
PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME, INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS, DAN PEMBAGIAN TUGAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Eka Farah Dewi¹, Agus Sunarmo^{2*}, Eko Suyono³, Permata Ulfah⁴

³Universitas Jenderal Soedirman; eka.dewi@mhs.unsoed.ac.id

^{2*}Universitas Jenderal Soedirman; agus.sunarmo@unsoed.ac.id; corresponding author

³Universitas Jenderal Soedirman; ekyo75@unsoed.ac.id

⁴Universitas Jenderal Soedirman; permata.ulfah@unsoed.ac.id

Abstract

This study aims to determine competency, professionalism, independence, objectivity and division of tasks towards the effectiveness of supervision of village fund allocation. The population in this study were all 61 Inspectorate employees including 1 Inspector, 17 Secretariat, 3 Assistant Inspectors, 8 P2UPD, and 32 Auditors who were registered in the 2017 Government Agency Inspectorate of Banyumas Regency Performance Report. The sample in this study were 43 employees including officials internal supervisor of the Inspectorate of Banyumas Regency. The results of the study show that: (1) Competence influences (significantly) the effectiveness of supervision of village fund allocation, (2) Professionalism has an effect (significantly) on the effectiveness of supervision of village fund allocations, (3) Independence influences (significantly) the effectiveness of village fund allocation monitoring. (4) Objectivity influences (not significant) on the operational performance of cooperatives, (5) Division of tasks influences (significantly) on the effectiveness of supervision of village fund allocations, (6) Competence is not the variable that most influences the effectiveness of supervision of village fund allocation. The implication from the above conclusions were (1) For the government, the effectiveness of supervision of Village Fund Allocation can be increased, among others by: (a) more intense supervision of APIP compliance with its role as an agent in reporting its performance to principal, (b) placing the APIP position appropriately free from intervention and obtaining adequate support from the Regional Government to be able to work with the auditee and carry out work freely and (c) the availability of supporting facilities and infrastructure that can maximize the performance of the Regional Inspectorate in carrying out the supervisory function in Banyumas Regency. (2) For the Inspectorate, the effectiveness of supervision of the Village Fund Allocation can be increased, among others by: (a) involvement in clients sought not to have a working relationship with supervised clients; (b) The Inspectorate holds a continuous mentoring program in the field of soft skills; (c) Maintaining honesty and fairness, impartiality and not having feelings of reluctance.

Keyword: *the effectiveness of supervision of village fund allocation, competence, professionalism, independence, objectivity, division of tasks*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas dan pembagian tugas terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat berjumlah 61 meliputi 1 Inspektur, 17 Sekretariat, 3 Inspektur Pembantu, 8 P2UPD, dan 32 Auditor yang terdaftar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 43 pegawai yang termasuk aparat pengawas intern pemerintah Inspektorat Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa, (2) Profesionalisme berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa, (3) Independensi berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa, (4) Objektivitas berpengaruh (tidak signifikan) terhadap kinerja operasional koperasi, (5) Pembagian tugas berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa, (6) Kompetensi bukan variabel yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Implikasi dari hasil penelitian yaitu (1) Bagi pemerintah, keefektifan pengawasan Alokasi Dana Desa dapat ditingkatkan antara lain dengan: (a) pengawasan yang lebih intens pada ketaatan APIP terhadap perannya sebagai agent dalam melaporkan kinerjanya ke principal, (b) menempatkan kembali posisi APIP secara tepat bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan

pekerjaan dengan leluasa serta (c) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang dapat memaksimalkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Banyumas. (2) Bagi Inspektorat, keefektifan pengawasan Alokasi Dana Desa dapat ditingkatkan antara lain dengan: (a) keterlibatan dalam klien diusahakan tidak memiliki hubungan kerja dengan klien yang diawasi; (b) Inspektorat mengadakan program pendampingan secara berkesinambungan dalam bidang soft skill; (c) Mempertahankan sikap jujur dan adil, tidak memihak dan tidak memiliki perasaan sungkan.

Kata kunci: kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas, pembagian tugas, efektivitas pengawasan, alokasi dana desa (ADD)

PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun daerahnya berdasarkan kebutuhan kondisi dan potensi yang ada di daerah. Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat, desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, sumber pendapatan desa terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD); (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah. Salah satu sumber keuangan terbesar untuk membiayai program Pemerintahan Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 137 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat potensi kurang lebih Rp 50 triliun dana yang akan didistribusikan ke 74.093 desa melalui mekanisme dana desa dan ADD untuk tahun anggaran 2016. Potensi dana yang akan terdistribusi ke desa melalui ADD membutuhkan suatu mekanisme pengendalian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (2015) menyatakan dengan adanya ADD yang mengalir ke desa dalam jumlah besar dapat menimbulkan potensi korupsi yang besar. Beberapa kasus korupsi terkait pemerintah desa terjadi di Kabupaten Banyumas. Dikutip dari radarbanyumas.co.id, Kepala Kejari Purwokerto menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 2 kasus dugaan korupsi APBDes di Kabupaten Banyumas, yaitu di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen, dan di Desa Tipar, Kecamatan Rawalo. Sektor dana yang dikorupsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang salah satunya bersumber dari ADD. Kajari menjelaskan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tipar, Kecamatan Rawalo diduga melakukan

korupsi APBDes sejak tahun 2014-2016. Dana yang seharusnya seluruhnya digunakan untuk pembangunan desa, digunakan untuk kepentingan pribadi hingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp 335.911.249. Sementara itu, tindakan korupsi APBDes di Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen merugikan keuangan negara senilai Rp 92.223.094. Modus yang digunakan oleh para tersangka adalah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif, markup harga, kuitansi fiktif dan pengurangan volume pengerjaan. Hal serupa juga terjadi di berbagai kota, antara lain 14 Kepala Desa di Purworejo melakukan markup harga dan kuantitas barang saat melakukan pembangunan di desa (news.detik.com). Di Kecamatan Luwu Timur, ada pengaduan laporan masyarakat di beberapa desa karena program pembangunan desa terkesan dibuat-buat dan tidak sesuai dengan rencana (palopopos.fajar.co.id).

Berdasar fakta dari beberapa kasus penyalahgunaan dan penyelewengan Alokasi Dana Desa yang terjadi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengelolaan ADD dengan realisasinya tersebut diakibatkan karena adanya kendala yang dihadapi pemerintah daerah yaitu kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang berasal dari ADD. Hal ini disebutkan dalam Laporan Hasil Kajian KPK yang menyatakan salah satu potensi masalah pengelolaan keuangan desa ialah pada pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat yang kurang efektif. Ketidakefektifan pengawasan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik secara personel maupun anggaran, sehingga tidak semua desa dapat diperiksa secara regular oleh inspektorat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan yang efektif memegang peranan kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Mihret dan Yismaw, 2007). Tujuan pengawasan ialah mengukur dan memperbaiki kegiatan-kegiatan bawahan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Silalahi, 2002:175). Variabel yang menentukan keefektifan pengawasan berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki, profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih dan berorientasi baik pada perbaikan dan peringatan dini. Dengan demikian efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa dapat ditentukan dari variabel kompetensi yang dimiliki, kecakapan profesional, independensi, objektivitas dan pembagian tugas.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) merupakan salah satu teori dasar yang menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain yang disebut agen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Teori ini menjelaskan pihak pembuat keputusan (*principal*) mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada agen. Prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan

penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal.

Efektivitas Pengawasan

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan efektif (Mardiasmo, 2009:134). Menurut Emerson (dalam Handayani, 1986:16) menyatakan efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Definisi Pengawasan

Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa (Sujanto, 1983:20). Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan (Handayani, 1986:143)

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dikutip pada Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/19, pengawasan alokasi dana desa bertujuan untuk menilai: (a) Ketepatan lokasi penyaluran alokasi dana desa ke desa yang berhak menerima; (b) Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran alokasi dana desa; (c) Ketepatan waktu penyaluran alokasi dana desa; (d) Ketepatan jumlah alokasi dana desa yang diterima dan disalurkan; (e) Ketepatan penggunaan alokasi dana desa dengan ketentuan yang berlaku.

Kompetensi

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017), kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal tertentu. Menurut Bedard (1986) dalam (Lastanti, 2005:88), kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Profesionalisme

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017), profesionalisme adalah kemampuan, keahlian dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Seseorang disebut profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk

melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan (Herawaty, 2008).

Independensi

Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak bergantung pada orang lain (Mulyadi, 2011). Pernyataan tersebut dijelaskan oleh Pusdiklatwas BPKP (2000) bahwa auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak dan yang tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor serta merupakan salah satu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lain dan prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan (Sukriah, dkk, 2009). Menurut Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014), objektivitas mempunyai sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penugasan yang dilakukan.

Pembagian Tugas

Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggungjawab untuk dan melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas (Stoner, 2006).

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Standar kompetensi auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill), dan sikap perilaku (attitude) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan baik, sehingga APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor).

H₁: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

2. Pengaruh Profesionalisme terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017) dinyatakan bahwa pemeriksa diwajibkan untuk menggunakan dengan cermat dan saksama keahlian/kemahiran profesionalnya dalam melakukan pemeriksaan. Standar ini menghendaki pemeriksa keuangan harus memiliki keahlian dibidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan

entitas yang diperiksa. APIP yang memiliki kecakapan professional akan menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta menerapkan pertimbangan professional dalam mengambil keputusan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan.

H₂: Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

3. Pengaruh Independensi terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Independen adalah sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 Tentang Standar Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen. Independensi APIP diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

H₃: Independensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

4. Pengaruh Objektivitas terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Objektif adalah memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bersikap objektif merupakan cara berfikir yang tidak memihak jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan.

H₄: Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

5. Pengaruh Pembagian Tugas terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Menurut Rivai (2004: 125) Pembagian tugas adalah hasil analisis pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Sama halnya dengan Hasibuan (2007: 33) pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian tugas merupakan dokumen formal yang berisi ringkasan informasi mengenai suatu jabatan untuk memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lain dalam suatu perusahaan. Adanya penumpukan tugas mempengaruhi kinerja organisasi di Inspektorat, untuk mencapai target pengawasan dibutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada staf (Nahrat, 2011).

H₅: Pembagian Tugas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

6. Variabel yang paling berpengaruh terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Menurut Sriwidodo dan Haryanto (2010), kinerja dan keefektifan pegawai dalam melaksanakan tugas sangat ditentukan oleh kompetensi yang disyaratkan oleh bidang pekerjaan. Melalui kompetensi yang semakin memadai seseorang akan lebih menguasai dan mampu menerapkan secara praktek semua tugas pekerjaan sesuai dengan job deskripsi yang ditetapkan. Kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap perilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik (Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor). Aspek kompetensi merupakan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor terkait dengan persyaratan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan.

H₆: Variabel kompetensi paling berpengaruh terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode survei dengan pendekatan pembahasan secara deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah tanggapan responden (Pegawai Inspektorat Banyumas) terhadap kompetensi, profesionalisme, independensi, obyektivitas, dan pembagian tugas yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Alokasi Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Inspektorat berjumlah 61 meliputi 1 Inspektur, 18 Sekretariat, 4 Inspektur Pembantu, 4 P2UPD, dan 34 Auditor yang terdaftar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Banyumas tahun 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang merupakan non-probability sampling dimana sampel dipilih sesuai kriteria sehingga mendukung penelitian. Kriteria dalam penelitian ini yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Inspektorat Kabupaten Banyumas yang melaksanakan pengawasan ADD dan berpartisipasi dalam menyusun laporan pengawasan. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel yang sesuai dengan kriteria sebanyak 43 orang. Dari seluruh populasi yang berjumlah 61 orang sebanyak 18 orang tidak memiliki peran atau tidak berpartisipasi dalam proses pengawasan sehingga sampel yang digunakan adalah 43 orang. Data utama penelitian berupa data persepsi responden dengan menggunakan kuesioner dan Data pendukung dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kepustakaan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Uji Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam uji instrumen penelitian ini adalah dengan memberikan angket (kuesioner) secara terstruktur dengan menggunakan skala likert 5 poin kepada responden di lapangan. Pilot test dilakukan untuk mengetahui tinggi rendahnya tingkat reliabilitas dan validitas atas kuesioner tersebut.

Uji Validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan ahli, dengan kata lain semakin tinggi validitas suatu test maka alat test tersebut semakin tepat mengenai sasarannya (Sekaran, 2011).

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang, maka menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik (Suliyanto, 2011).

Statistik Deskriptif

Statistik digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari data penelitian. (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S). Jika nilai asymmtotic significancy $> (\alpha) 0,05$ maka data telah terdistribusi normal (Suliyanto, 2011).

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi korelasi atau ditemukan hubungan antar variabel bebas (independent variable) atau tidak. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas antar variabel, salah satu caranya dengan melihat nilai dari VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jika $VIF < 10$ dan batas tolerance $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Suliyanto, 2011).

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk mendeteksinya dalam suatu model regresi, yaitu dengan melakukan uji park Glesyer. Jika nilai probabilitasnya $> \alpha (0,05)$ atau $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada nilai $\alpha = 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

Analisis Pengaruh

Analisis pengaruh bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan model analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2009). Model analisis regresi linear berganda menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + \beta_5 \cdot X_5 + e$$

Keterangan:

Y	= Efektivitas pengawasan alokasi dana desa
α	= Konstanta
X_1	= Kompetensi
X_2	= Profesionalisme
X_3	= Independensi
X_4	= Obyektivitas
X_5	= Pembagian tugas
β	= Koefisien regresi
e	= Kesalahan Residual

Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit Model)

Uji ketepatan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual. Uji ketepatan model dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} dengan degree of freedom $(k-1)$, $(n-k)$ dan $\alpha = 0,05$. Apabila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau model regresi dinyatakan fit (Ghozali, 2009).

Uji Determinasi Pengaruh (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen relatif terbatas. Jika nilai R^2 mendekati angka satu berarti variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Suliyanto, 2011).

Uji Pengaruh

Uji Pengaruh Parsial (Uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai thitung terhadap nilai ttabel dengan menggunakan pengujian hipotesis dua ujung/two-tailed). Kriteria pengujian:

1. H_0 diterima jika $-t_{\alpha/2} \leq t_0 \leq t_{\alpha/2}$
2. H_0 ditolak jika $t_0 > t_{\alpha/2}$ atau $t_0 < -t_{\alpha/2}$

Uji Elastisitas untuk mengetahui variabel independen (X) yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), formula yang digunakan untuk uji elastisitas (Supranto, 2001):

$$\epsilon_j = \hat{\beta}_j \frac{\bar{X}_j}{\bar{Y}}$$

1. Hipotesis diterima apabila $\epsilon_{X1} > \epsilon_{X2}, \epsilon_{X3}, \epsilon_{X4}, \epsilon_{X5}$
2. Hipotesis ditolak apabila $\epsilon_{X1} \leq \epsilon_{X2}, \epsilon_{X3}, \epsilon_{X4}, \epsilon_{X5}$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Penelitian

Responden uji instrumen penelitian ini yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) Inspektorat Kabupaten Purbalingga sebanyak 20 orang. Menurut Ancok (1997) jumlah responden yang digunakan untuk uji coba sebaiknya minimal 15 responden, karena dengan jumlah responden tersebut maka nilai dan hasil pengukuran akan mendekati distribusi normal.

Uji Validitas

Dalam penelitian ini pengujian validitas yang digunakan adalah dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total menggunakan rumus korelasi *Product Moment*, kemudian membandingkan nilai *Correlated Item-Total Correlation* (r_{hitung}) dengan nilai r_{tabel} , apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan dianggap valid, begitupun sebaliknya apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka pernyataan dianggap tidak valid. Data input uji validitas disajikan dalam lampiran 2. Jumlah responden (n) = 20 dengan tingkat signifikansi 95 persen serta *degree of freedom* ($n - 2$) maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,444. Uji validitas instrumen penelitian dilakukan dengan bantuan *software SPSS 16 for windows*. Hasil analisis uji validitas disajikan dalam lampiran 3.

Ringkasan hasil uji validitas disajikan dalam beberapa tabel untuk instrumen variabel: Kompetensi (Tabel 5); Profesionalisme (Tabel 6); Independensi (Tabel 7); Objektivitas (Tabel 8); Pembagian tugas (Tabel 9); dan Efektivitas pengawasan alokasi dana desa (Tabel 10). Penjelasan instrumen variabel disajikan dalam lampiran 3.

Tabel 5. Validitas Instrumen Variabel Kompetensi

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengetahuan			
01	0,814	0,444	Valid
02	0,762	0,444	Valid
03	0,838	0,444	Valid
Pengalaman			
04	0,886	0,444	Valid
05	0,487	0,444	Valid
06	0,591	0,444	Valid
07	0,570	0,444	Valid
08	0,588	0,444	Valid
09	0,713	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 5, instrumen setiap variabel kompetensi valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Tabel 6. Validitas Instrumen Variabel Profesionalisme

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengabdian Terhadap Profesi			
01	0,783	0,444	Valid
02	0,632	0,444	Valid
Kewajiban Sosial			
03	0,805	0,444	Valid
04	0,720	0,444	Valid
Kemandirian			
05	0,669	0,444	Valid
06	0,834	0,444	Valid
Keyakinan Sesama Profesi			
07	0,549	0,444	Valid
08	0,659	0,444	Valid
Hubungan Sesama Profesi			
09	0,529	0,444	Valid
10	0,621	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 6, instrumen setiap variabel profesionalisme dapat dinyatakan valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Tabel 7. Validitas Instrumen Variabel Independensi

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Independensi Penyusunan Program			
01	0,811	0,444	Valid
02	0,609	0,444	Valid
Independensi Investigatif			
03	0,598	0,444	Valid
04	0,615	0,444	Valid
05	0,782	0,444	Valid
06	0,850	0,444	Valid
Independensi Pelaporan			
07	0,512	0,444	Valid
08	0,826	0,444	Valid
09	0,896	0,444	Valid
10	0,719	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 7, instrumen setiap variabel independensi dapat dinyatakan valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Tabel 8. Validitas Instrumen Variabel Objektivitas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Dapat diandalkan dan dipercaya			
01	0,706	0,444	Valid
02	0,870	0,444	Valid
Mempertahankan sikap tidak memihak selama audit			
03	0,902	0,444	Valid
04	0,533	0,444	Valid
Mengambil keputusan berdasarkan keputusan logis			
05	0,845	0,444	Valid
06	0,902	0,444	Valid
Tanggung Jawab			
07	0,672	0,444	Valid
08	0,893	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 8, instrumen setiap variabel objektivitas dapat dinyatakan valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Tabel 9. Validitas Instrumen Variabel Pembagian Tugas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penempatan karyawan			
01	0,687	0,444	Valid
02	0,542	0,444	Valid
03	0,724	0,444	Valid
Beban kerja			
04	0,506	0,444	Valid
05	0,519	0,444	Valid
06	0,612	0,444	Valid
Spesialisasi Pekerjaan			
07	0,598	0,444	Valid
08	0,519	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 9, instrumen setiap variabel pembagian tugas dapat dinyatakan valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Tabel 10. Validitas Instrumen Variabel Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Tepat lokasi			
01	0,474	0,444	Valid
02	0,603	0,444	Valid
Tepat syarat			
03	0,726	0,444	Valid
04	0,876	0,444	Valid
05	0,876	0,444	Valid
Tepat waktu			
06	0,738	0,444	Valid
07	0,725	0,444	Valid
08	0,613	0,444	Valid
Tepat jumlah			
09	0,866	0,444	Valid
10	0,837	0,444	Valid
11	0,668	0,444	Valid
Tepat penggunaan			
12	0,539	0,444	Valid
13	0,638	0,444	Valid
14	0,743	0,444	Valid
15	0,849	0,444	Valid
16	0,655	0,444	Valid
17	0,612	0,444	Valid

Dengan demikian, berdasarkan data pada tabel 10, instrumen setiap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa dapat dinyatakan valid, karena r_{hitung} setiap instrumen lebih besar dari r_{tabel} 0,444.

Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas kuesioner atau pernyataan dalam penelitian ini digunakan uji reliabilitas *Cronbach Alpha*. Setiap variabel dinyatakan reliabel bila memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60. Uji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan bantuan *software SPSS 16 for windows*. Berdasarkan data input pada lampiran 2, hasil analisis disajikan dalam lampiran 4. Ringkasan hasil analisis disajikan dalam tabel 11.

Tabel 11. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	r tabel	Kesimpulan
Efektivitas Pengawasan ADD (Y)	0,934	0,444	Reliabel
Kompetensi (X ₁)	0,873	0,444	Reliabel
Profesionalisme (X ₂)	0,865	0,444	Reliabel
Independensi (X ₃)	0,880	0,444	Reliabel
Objektivitas (X ₄)	0,910	0,444	Reliabel
Pembagian Tugas (X ₅)		0,444	Reliabel
	0,715		

Berdasarkan ringkasan output data pada tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai untuk *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel dalam penelitian ini menunjukkan koefisien $> 0,6$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa (Y), variabel Kompetensi (X₁), variabel Profesionalisme (X₂), variabel Independensi (X₃), variabel Objektivitas (X₄), dan variabel Pembagian Tugas (X₅) dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

a. Deskripsi Secara Statistik

Untuk memberikan gambaran tentang skor jawaban responden pada setiap variabel yang diteliti, dilakukan perhitungan ukuran tendensi sentral berikut ini.

Tabel 12. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maksimal	Minimal	Range	Std. Deviasi
Efektivitas Pengawasan ADD (Y)	4,18	5,00	3,65	1,35	0,38836
Kompetensi (X ₁)	4,32	5,00	3,50	1,50	0,40054
Profesionalisme (X ₂)	4,22	5,00	3,90	1,10	0,35157
Independensi (X ₃)	4,22	5,00	3,63	1,37	0,34561
Objektivitas (X ₄)	4,22	5,00	3,75	1,25	0,36269
Pembagian Tugas (X ₅)	4,25	5,00	3,65	1,35	0,39994

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif pada tabel 12, dapat diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki rata-rata 4,32 dengan standar deviasi sebesar 0,40054. Standar deviasi merupakan gambaran penyimpangan data dari nilai rata-rata. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum dari variabel kompetensi sebesar 3,50. Nilai maksimum dari variabel kompetensi sebesar 5,00.

Variabel profesionalisme memiliki nilai rata-rata sebesar 4,22 dengan standar deviasi sebesar 0,35157. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum variabel

profesionalisme sebesar 3,90. Nilai maksimum dari variabel profesionalisme sebesar 5,00.

Variabel independensi memiliki nilai rata-rata sebesar 4,22 dengan standar deviasi sebesar 0,34561. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum variabel independensi sebesar 3,63. Nilai maksimum dari variabel independensi sebesar 5,00.

Variabel objektivitas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,22 dengan standar deviasi sebesar 0,36269. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum variabel objektivitas sebesar 3,75. Nilai maksimum dari variabel objektivitas sebesar 5,00.

Variabel pembagian tugas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,25 dengan standar deviasi sebesar 0,39994. Oleh sebab itu, nilai rata-rata yang lebih besar daripada nilai standar deviasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data dengan baik. Nilai minimum variabel pembagian tugas sebesar 3,65. Nilai maksimum dari variabel pembagian tugas sebesar 5,00.

b. Deskripsi Tanggapan Responden

Deskripsi tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan hasil respon/tanggapan dari responden terhadap masing-masing indikator item pertanyaan/pernyataan dalam kuisioner penelitian. Rata-rata skor jawaban responden dikategorikan menjadi lima tingkatan yaitu: skor kurang dari 1,5 menunjukkan skala kondisi sangat tidak setuju; 1,5 sampai dengan kurang dari 2,5 menunjukkan skala kondisi tidak setuju; 2,5 sampai dengan kurang dari 3,5 menunjukkan skala kondisi ragu-ragu; 3,5 sampai dengan kurang dari 4,5 menunjukkan skala kondisi setuju; dan lebih dari 4,5 menunjukkan skala kondisi sangat setuju.

1) Kompetensi (X1)

Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen pengetahuan dan pengalaman berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.

2) Profesionalisme (X2)

Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan sesama profesi dan hubungan sesama profesi berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.

3) Independensi (X3)

Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen independensi penyusunan program, investigatif dan pelaporan berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.

-
- 4) Objektivitas (X4)
Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen dapat diandalkan dan dipercaya, sikap tidak memihak, mengambil keputusan logis dan tanggung jawab berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.
 - 5) Pembagian tugas (X5)
Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen penempatan karyawan, beban kerja dan spesialisasi kerja berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.
 - 6) Efektivitas Pengawasan ADD (Y)
Berdasarkan data input pada lampiran 5, rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 menyatakan setuju bahwa instrumen tepat lokasi, tepat syarat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penggunaan berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD.
 - 7) Hubungan antar variabel X dan Y
Berdasarkan data input pada lampiran 5 dan rata-rata skor jawaban responden yang disajikan dalam lampiran 9 dapat diketahui bahwa profesionalisme yang terkait dengan indikator keyakinan sesama profesi memiliki rata-rata skor tanggapan responden yang paling rendah diantara item indikator pertanyaan variabel lainnya meskipun rata-rata skor tanggapan responden tersebut tergolong dalam skala kondisi setuju yaitu sebesar 3,90 untuk pernyataan nomor satu serta 4,32 untuk pernyataan nomor dua. Pernyataan tersebut berkaitan dengan keyakinan sesama profesi dalam pengawasan atas laporan keuangan untuk memberi suatu gambaran bagi suatu perusahaan/organisasi dan keyakinan mempunyai cara dan kekuatan untuk pelaksanaan standar internal auditor.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berdasarkan data input pada lampiran 5, uji normalitas dilakukan dengan pengujian analisis *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows*. Hasil analisis uji normalitas disajikan dalam lampiran 7 yang menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,913 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan data input pada lampiran 5, uji asumsi klasik multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) yang dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows*. Hasil analisis uji multikolinieritas disajikan dalam lampiran 7 dan ringkasan hasilnya disajikan dalam tabel 13. Data dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* > 0,10.

Tabel 13. Ringkasan Hasil Analisis Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi (X ₁)	0,885	1,129	Tidak terjadi multikolinieritas
Profesionalisme (X ₂)	0,870	1,149	Tidak terjadi multikolinieritas
Independensi (X ₃)	0,900	1,111	Tidak terjadi multikolinieritas
Objektivitas (X ₄)	0,844	1,185	Tidak terjadi multikolinieritas
Pembagian tugas (X ₅)	0,900	1,110	Tidak terjadi multikolinieritas

Jika nilai VIF < 10 atau *tolerance* > 0,10 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas (Suliyanto, 2011). Berdasarkan hasil pada lampiran 7 nilai VIF variabel kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas dan pembagian tugas lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa pada model regresi yang dibentuk tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan data input pada lampiran 5, uji asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Park Glejser* yang dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows*. Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode *Park Glejser* dengan kriteria apabila nilai probabilitasnya > 0,05, maka model regresi tidak mengandung unsur heteroskedastisitas (Suliyanto, 2005).

Tabel 14. Nilai uji park gleyser

No	Variabel Bebas	Sig	Keterangan
1	Kompetensi (X ₁)	0,630	Tidak Ada Heteroskedastisitas
2	Profesionalisme (X ₂)	0,958	Tidak Ada Heteroskedastisitas
3	Independensi (X ₃)	0,139	Tidak Ada Heteroskedastisitas
4	Objektivitas (X ₄)	0,873	Tidak Ada Heteroskedastisitas
5	Pembagian tugas (X ₅)	0,102	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Berdasarkan ringkasan output data pada tabel 14, hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas untuk keseluruhan variabel dalam penelitian.

Analisis Pengaruh

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas dan pembagian tugas terhadap variabel dependennya yaitu efektivitas pengawasan alokasi dana

desa. Analisis ini dapat dilakukan dengan syarat jika suatu persamaan regresi memiliki data yang berdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinieritas dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berdasarkan data input pada lampiran 5, analisis dilakukan dengan bantuan *software SPSS 16 for windows* dan hasil analisis disajikan dalam lampiran 8. Ringkasan hasil analisis disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Signifikansi
Kompetensi (X_1)	0,251	2,408	2,021	0,021
Profesionalisme (X_2)	0,247	2,061	2,021	0,046
Independensi (X_3)	0,357	2,984	2,021	0,005
Objektivitas (X_4)	0,244	2,071	2,021	0,045
Pembagian Tugas (X_5)	0,274	2,652	2,021	0,012

Konstanta = -1,644
R square = 0,622
Adjusted R Square = 0,571
 $F_{hitung} = 12,192$
 $F_{tabel} = 2,46$

Berdasarkan data pada tabel 16, dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,644 + 0,251X_1 + 0,247X_2 + 0,357X_3 + 0,244X_4 + 0,274X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa

X_1 = Kompetensi

X_2 = Profesionalisme

X_3 = Independensi

X_4 = Objektivitas

X_5 = Pembagian Tugas

e = error

Berdasar pada persamaan tersebut dapat dijelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar minus 1,644 artinya efektivitas pengawasan akan bernilai minus 1,644 satuan skor apabila efektivitas pengawasan, kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas, dan pembagian tugas. Nilai konstanta negatif ini tidak menjadi masalah karena menggunakan Skala Likert antara 1 sampai dengan 5, sehingga variabel efektivitas pengawasan, kompetensi, profesionalisme, independensi, objektivitas dan pembagian tugas tidak boleh diinterpretasikan bernilai nol. Kelima variabel tersebut tidak mungkin bernilai nol karena Skala Likert terendah yang digunakan adalah 1 (Mulyono, 2011). Menurut Rietveld dan Sunaryanto (1994) nilai konstanta negatif bukan alasan untuk menyimpulkan persamaannya salah. Tanda negatif diabaikan selama uji model regresi sudah memenuhi asumsi yaitu data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi multikolinieritas serta selama nilai slope tidak nol maka tidak perlu memperdulikan konstanta negatif ini (Dougherty, C., 2002).

- b. Koefisien regresi kompetensi (X_1) sebesar 0,251 artinya variabel kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan jika kompetensi meningkat sebesar satu satuan skor, maka efektivitas pengawasan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,251 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.
- c. Koefisien regresi profesionalisme (X_2) sebesar 0,247 yang berarti variabel profesionalisme mempunyai pengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa jika profesionalisme meningkat sebesar satu satuan skor, maka efektivitas pengawasan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,247 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.
- d. Koefisien regresi independensi (X_3) sebesar 0,357 yang berarti variabel independensi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa jika independensi meningkat sebesar satu satuan skor, maka efektivitas pengawasan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,357 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.
- e. Koefisien regresi objektivitas (X_4) sebesar 0,244 yang berarti variabel objektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa jika objektivitas meningkat sebesar satu satuan skor, maka efektivitas pengawasan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,244 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.
- f. Koefisien regresi pembagian tugas (X_2) sebesar 0,274 yang berarti variabel pembagian tugas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa jika pembagian tugas meningkat sebesar satu satuan skor, maka efektivitas pengawasan alokasi dana desa akan meningkat sebesar 0,420 satuan skor dengan menganggap variabel lain tetap.

Uji Ketepatan Model (*Goodness of Fit*)

Uji ketepatan model (*goodness of fit*) dilakukan untuk menaksir nilai aktual dalam ketepatan fungsi regresi sampel (Ghozali, 2011). Uji ketepatan model dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows*. Ringkasan hasil uji ketepatan model disajikan dalam tabel 16.

Tabel 16. Hasil Uji Ketepatan Model

	Model	Sig.
1	Regression	0,000 ^a
	Residual	
	Total	

Hasil signifikansi diketahui $0,00 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa model regresi dinyatakan layak digunakan untuk mengestimasi populasi atau memenuhi *goodness of fit*.

Uji Determinasi Pengaruh (R^2)

Adjusted R² merupakan koefisien determinasi yang telah terkoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan

variabel. Berdasarkan data input pada lampiran 5, uji determinasi dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows* dan hasil analisis determinasi disajikan dalam lampiran 8. Ringkasan hasil analisis uji determinasi disajikan dalam tabel 17.

Tabel 17. Hasil Uji Determinasi Pengaruh

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,789 ^a	0,622	0,571	4,32530

Berdasarkan ringkasan hasil dalam Tabel 17 menunjukkan bahwa hasil dari Uji Determinasi Pengaruh menghasilkan nilai sebesar 0,571 atau 57,1 persen yang berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 57,1 persen, sedangkan sisanya ($100\% - 57,1\% = 42,9\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini diantaranya integritas (Yusuf, 2014), etika (Jasman, 2016), akuntabilitas (Saripudin, dkk, 2012) dan komitmen organisasi (Budiman, 2016).

Uji Pengaruh

Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Uji pengaruh secara parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Berdasarkan data input pada lampiran 5, uji pengaruh secara parsial (uji t) dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 16.0 for windows* dan hasil uji t disajikan dalam lampiran 8. Ringkasan hasil uji t disajikan dalam tabel 18.

Tabel 18. Hasil Ringkasan Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t_{hitung}	Nilai t_{tabel}	Signifikansi
Konstanta	-1,644	-2,195	2,021	0,035
Kompetensi (X_1)	0,251	2,408	2,021	0,021
Profesionalisme (X_2)	0,247	2,061	2,021	0,046
Independensi (X_3)	0,357	2,984	2,021	0,005
Objektivitas (X_4)	0,244	2,071	2,021	0,045
Pembagian Tugas (X_5)	0,274	2,652	2,021	0,012

Tabel 18 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk masing-masing variabel $t_1 = 2,408$, $t_2 = 2,061$, $t_3 = 2,984$, $t_4 = 2,071$, dan $t_5 = 2,652$. Nilai t_{tabel} dengan menggunakan level of significance 95 persen ($\alpha = 0,05$) dan derajat bebas 37 diketahui sebesar 2,021. Hasil pengujian tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kompetensi

Nilai t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,408 > 2,021$) berarti secara parsial, kompetensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa” terkonfirmasi dan didukung.

2. Profesionalisme

Nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel ($2,061 > 2,021$) berarti secara parsial, profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa” terkonfirmasi dan didukung.

3. Independensi

Nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel ($2,984 > 2,021$) berarti secara parsial, independensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Independensi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa” terkonfirmasi dan didukung.

4. Objektivitas

Nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel ($2,071 > 2,021$) berarti secara parsial, objektivitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa “Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa” terkonfirmasi dan didukung.

5. Pembagian tugas

Nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel ($2,652 > 2,021$) berarti secara parsial, pembagian tugas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Pembagian tugas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengawasan Alokasi Dana Desa” terkonfirmasi dan didukung.

Uji Elastisitas

Uji elastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui variabel independen (X) manakah yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan data input pada lampiran 6, hasil uji elastisitas disajikan dalam lampiran 8. Ringkasan hasil uji elastisitas disajikan dalam tabel 19.

Tabel 19. Hasil Uji Elastisitas

Variabel	β_j	X_j	\bar{Y}	E_j
Kompetensi (X_1)	0,251	38,8372	71,0698	0,1371
Profesionalisme (X_2)	0,247	42,2093	71,0698	0,1466
Independensi (X_3)	0,357	42,2326	71,0698	0,2121
Objektivitas (X_4)	0,244	33,7442	71,0698	0,1158
Pembagian Tugas (X_5)	0,274	33,9535	71,0698	0,1309

Berdasarkan output pada tabel 19 diketahui bahwa variabel independen memiliki nilai absolut E paling besar yaitu independensi 0,2121 ($E_3 > E_1, E_2, E_4$). Dengan demikian independensi adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Dengan demikian hipotesis keenam menyatakan bahwa variabel kompetensi yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa tidak didukung.

Pembahasan

Pengaruh kompetensi terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Kompetensi mencakup pengetahuan dan pengalaman. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban/tanggapan responden dalam penelitian yang rata-rata menyatakan setuju terhadap seluruh instrumen variabel kompetensi. Responden menyatakan setuju bahwa pengetahuan dan pengalaman terhadap standar dan kode etik APIP, pendidikan serta pelatihan berhubungan dengan efektivitas pengawasan ADD. Hal ini juga tampak dari pendidikan dan keterampilan yang dimiliki responden. Formasi pegawai di Inspektorat Kabupaten Banyumas sebesar 76,74 persen dengan kualifikasi lulus strata satu atau sarjana. Pelatihan yang telah diikuti oleh para responden dalam penelitian ini selaku aparat pengawasan intern pemerintah, seluruh responden telah mengikuti diklat pembentukan Pejabat Fungsional Auditor dan lulus ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor. Aspek kompetensi merupakan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor terkait dengan persyaratan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan jenjang jabatan Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompeten seorang pengawas akan semakin tinggi kualitas pengawasan alokasi dana desa.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Yusuf (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor dan hasil penelitian Marganingsih (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit serta hasil penelitian Gamayuni (2016) yang juga menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas fungsi audit internal.

Pengaruh profesionalisme terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Profesionalisme mencakup pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi dan hubungan sesama profesi. Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban/tanggapan responden dalam penelitian yang rata-rata menyatakan setuju terhadap seluruh item pertanyaan/ Pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kecakapan profesional yang dimiliki seorang pengawas maka semakin baik pula hasil pengawasan dan tingkat keahlian yang dimiliki seorang pengawas dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Hasil penelitian ini sama secara konseptual, bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh profesionalisme dan motivasi kerja yang merupakan kemampuan individu untuk menggunakan usaha yang tinggi dalam upaya mencapai tujuan-tujuan perusahaan, apabila tuntutan kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan kecakapan profesional maka kinerja yang diharapkan akan sulit tercapai (Wroom dalam Cahyasumirat, 2006). Peningkatan efektivitas pengawasan alokasi dana desa dari seorang APIP sangat tergantung pada tingkat kecakapan profesional yang dimiliki, jika kecakapan profesional APIP rendah maka pelaksanaan tugas pengawasan akan dapat tidak tercapai.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Sebastiano (2013) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan inspektorat, dan hasil penelitian Pasaribu et al. (2015) yang menyatakan bahwa kecakapan profesional berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal.

Pengaruh independensi terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Menurut De Angelo (1981) kualitas audit adalah kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya, auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor telah terbukti secara signifikan, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas pengawasan ADD dapat

ditentukan oleh variabel independensi. Pengawas akan dengan leluasa melakukan tugas-tugas dan terhindar dari tekanan-tekanan dari pihak luar sehingga hasil pengawasan maksimal.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Sebastiano (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemeriksaan pada inspektorat, dan hasil penelitian Pasaribu et al. (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap hasil pemeriksaan auditor internal. Selain itu hasil penelitian Afni (2012) juga menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh objektivitas terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Objektivitas mencakup dapat diandalkan dan dipercaya, mempertahankan sikap tidak memihak selama audit, tanggung jawab dan mengambil keputusan berdasarkan keputusan logis. Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban/tanggapan responden dalam penelitian yang rata-rata menyatakan setuju terhadap seluruh item pertanyaan/ Pernyataan.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Arianti et al. (2014) yang menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit di pemerintah daerah. Penelitian Arianti menyimpulkan bahwa auditor yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan didukung oleh sikap obyektivitas akan dapat meningkatkan kualitas audit. Semakin tinggi obyektivitas yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin meningkat kualitas audit yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah obyektivitas auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan. Peningkatan kualitas audit yang dihasilkan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor. Selain itu hasil penelitian Gamayuni (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh objektivitas auditor internal terhadap efektivitas fungsi audit internal.

Pengaruh pembagian tugas terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Pembagian tugas mencakup penempatan karyawan, beban kerja dan spesialisasi pekerjaan. Hal ini dapat dihubungkan dengan hasil jawaban/tanggapan responden dalam penelitian yang rata-rata menyatakan setuju terhadap seluruh item pertanyaan/ Pernyataan indikator variabel pembagian tugas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin jelas tingkat pembagian tugas maka efektivitas pengawasan semakin baik karena terorganisir dan tidak terjadi tumpang tindih.

Hasil penelitian Nahrat (2011) mengemukakan adanya penumpukan tugas mempengaruhi kinerja organisasi di Inspektorat, untuk mencapai target pengawasan dibutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada staf. Perincian tugas dimaksud agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien maka para pegawai perlu dibuatkan perincian tugas sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan pegawai bersangkutan. Perincian tugas ini menjadi panduan bagi seorang pegawai agar dapat mengetahui semua pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya (Widiyanto, 2016).

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Widiyanto (2016) yang menyatakan bahwa pembagian tugas mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai dan hasil penelitian

Herawati (2016) juga menyatakan bahwa pembagian kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa

Hal ini menunjukkan untuk mencapai efektivitas tidak hanya dibutuhkan kompetensi sebagai syarat melaksanakan fungsi pengawasan akan tetapi faktor utama yang dibutuhkan adalah independensi. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al, 2008). Dalam standar umum 2000 (SAIPI, 2014), kompetensi merupakan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Dalam standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Berdasarkan hal itu, dapat dihubungkan dengan karakteristik responden pada tabel 3 dan tabel 4 bahwa latar belakang pendidikan serta pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh responden sangat mendukung dalam rangka menjalankan tugas khususnya yang berhubungan dengan efektivitas pengawasan.

Dalam pengembangan SDM agar tidak terjadinya kesenjangan dibutuhkan pengembangan kemampuan teknis sebagai auditor hard skill dan soft skill yang merata (Humas Itjen, 2018). Di samping wajib memiliki tingkat pendidikan formal dan keahlian, pengawas wajib memiliki pengalaman dan keterampilan (soft skill) dalam mempertahankan sikap yang tepat dan profesional serta memiliki kemampuan mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit berdasarkan fakta. Di samping wajib memiliki tingkat pendidikan formal dan keahlian, pengawas wajib memiliki pengalaman dan keterampilan dalam mempertahankan sikap yang tepat dan profesional serta memiliki kemampuan mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit berdasarkan fakta. Dalam hal efektivitas pengawasan untuk menilai dan menghasilkan laporan pengawasan yang relevan dan objektif dibutuhkan aspek independensi terhadap kompetensi dalam mempertimbangkan fakta yang diauditnya atau disebut independence in competence (Supriyati et al, 2002). Dengan adanya sikap independen atau independence in competence, pengawas harus profesional memanfaatkan informasi dengan cara tidak memihak dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya untuk menciptakan standar pelaporan yang objektif, diandalkan dan relevan terhadap tujuan pengawasan (Rachmawati, 2006). Hasil penelitian mendukung hasil penelitian Singgih dan Bawono (2010) yang menyatakan bahwa independensi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit serta hasil penelitian Prattama et al. (2014) menyatakan bahwa independensi memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas hasil pemeriksaan dibandingkan akuntabilitas, tingkat pendidikan dan pendidikan berkelanjutan. Penelitian Basar (2015) juga menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kualitas hasil pemeriksaan dibandingkan pengalaman kerja dan objektivitas.

KESIMPULAN**SIMPULAN**

1. Kompetensi berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.
2. Profesionalisme berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.
3. Independensi berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.
4. Objektivitas berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.
5. Pembagian tugas berpengaruh (signifikan) terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.
6. Kompetensi bukan variabel yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa.

IMPLIKASI

1. Bagi pemerintah, keefektifan pengawasan Alokasi Dana Desa dapat ditingkatkan antara lain dengan: (a) pengawasan yang lebih intens pada ketaatan APIP terhadap perannya sebagai agent dalam melaporkan kinerjanya ke principal, (b) menempatkan kembali posisi APIP secara tepat bebas dari intervensi dan memperoleh dukungan yang memadai dari Pemerintah Daerah untuk dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa serta (c) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang dapat memaksimalkan kinerja dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Banyumas.
2. Bagi Inspektorat, keefektifan pengawasan Alokasi Dana Desa dapat ditingkatkan antara lain dengan: (a) keterlibatan dalam klien diusahakan tidak memiliki hubungan kerja dengan klien yang diawasi; (b) Inspektorat mengadakan program pendampingan secara berkesinambungan dalam bidang soft skill; (c) Mempertahankan sikap jujur dan adil, tidak memihak dan tidak memiliki perasaan sungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Z., Sriyuniarti, F., Ahmad, A. W. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan dalam Pengawasan Keuangan Daerah: Studi pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol 7. pp. 69-77.
- Ancok, D. (1997). *Penyusunan Skala Pengukur*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Arens, Randal, Mark. (2008). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid-1, Edisi Ke-9. Jakarta: PT. Indeks.
- Arianti, K. P., Sujana, E., Putra, P. A. (2014). Pengaruh Integritas, Objektivitas, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 1.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). (2014). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)*. Jakarta: AAIPI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Ditama Binbangkum BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2010). *Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor*. Jakarta: BPKP Pusat.
- _____. (2011). *Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*
- Basar, N.F. (2015). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, dan Obyektivitas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
- Budiman, S.P. (2016). Pengaruh Struktur Audit, *Locus Of Control*, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di Inspektorat Kab.Agam, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang). Universitas Negeri Padang.
- Cahyasumirat, Gunawan. (2006). Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. Universitas Diponegoro.
- Chotimah, Chusnul. (2017). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgment. *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*. Universitas Stikubank Semarang.
- De Angelo, L. E. (1981). *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics*.
- Dewi, T. S. (2005). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Bagian Produksi PT. Dupantex Kabupaten Pekalongan. Universitas Negeri Semarang.
- Gamayuni, R. R. (2016). Pengaruh Kompetensi Dan Objektivitas Auditor Internal Terhadap Efektivitas Fungsi Audit Internal (Survei Pada Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Pulau Jawa). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 21. pp. 171-194.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handyaningrat, S. (1992). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa Indah.
- Herawati, Herni. (2016). Analisis Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Universitas Pasundan.
- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. Universitas Trisakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

-
- Jasman, Amir, A. M., Iqbal, M. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Etika Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong. *e-Journal Katalogis*, Volume 4 Nomor 4. pp. 14-24. Universitas Tadulako.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). *The Teory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*, *Journal of Financial and Economies*. pp. 305-360.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008).
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008).
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta.
- Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/163/Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan Yang Diterima Kabupaten Untuk Masing-Masing Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*. Jakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Banyumas
- Lastanti, H. S. (2005). *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi Auditing dan Informasi*. Vol. 5 No.1 April 2005.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Marganingsih. (2016). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Akuntabilitas, Pengalaman Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Pada Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). Universitas Negeri Surakarta.
- Mihret, D. G., Yismaw, A. W. (2007). Internal Audit Effectivess: an Ethiopian Public Sector Case Study. *Managerial Accounting Journal*. pp. 470-481.
- Moran, J.W., Brightman. (2000). Leading Organizational Change. *Journal of Workplace Learning*. Vol. 12. No. 2.
- Mulyadi. (2011). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Nahrat, W. O. (2011). Analisis Efektivitas Kinerja Pengawasan Oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Buton. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik. Universitas Terbuka, Kendari.
- Pasaribu, S. H., Morasa, J., Tangkuman, S. (2015). Pengaruh Kecakapan Profesional, Independensi Dan Lama Bekerja Terhadap Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pada Inspektorat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. Vol.6. pp. 1-11.
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2016. Tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

-
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Prattama, A.S., Sinarwati, Atmaja, A.T. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris: Inspektorat Kabupaten Buleleng)
- Pusdiklatwas BPKP. (2000). *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor: BPKP RI.
- Rachmawati, Lenny. (2006). Analisis Pengaruh *Independence in Fact, Independence in Appearance dan Independence in Competence* Terhadap Kualitas Audit pada KAP di Surabaya. Universitas Airlangga.
- Radar Banyumas. (2015, November 7). Bantuan Untuk Desa Hanya Diawasi Inspektorat. *Radar Banyumas Online*. Diakses dari <http://radarbanyumas.co.id/>
- _____. (2017, Juli 21). Kades Krajan dan Dua Perangkat Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa. *Radar Banyumas Online*. Diakses dari <http://radarbanyumas.co.id/>
- Rai, I. G. A. (2009). Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Rivai, V. (2004). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saripudin, Herawaty, N., Rahayu. (2012). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Survei Terhadap Auditor Kap di Jambi dan Palembang). *e-journal Binar Akuntansi*. pp. 5-12. Universitas Jambi.
- Sebastiano, H. (2013). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Kompleksitas Tugas Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Efektivitas Pemeriksaan (Studi Pada Inspektorat Papua Barat). Universitas Gadjah Mada.
- Sekaran, U. (2006). Metode Penelitian Untuk Bisnis 1. (4th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, U. (2002). *Studi Tentang Ilmu Administrasi* Cetakan kelima. Bandung: Sinar Baru Aglesindo
- Singgih, E.M., Bawono, I.R. (2010). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Universitas Jenderal Soedirman.
- Sriwidodo, Untung, Haryanto. (2010). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Komunikasi dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. pp. 47-57
- Stoner, J. A. F. (2006). *Manajemen*. Jilid I. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujamto. (1983). Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan. Jakarta: Ghalia
- Sukriah, I., Akram, Inapty, B. A. (2009). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Palembang: SNA XII.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Supranto. 2001. Statistik Teori Dan Aplikasi. Edisi 6. Erlangga. Jakarta.
- Supriyati, Nurmala dan Wilopo. (2002). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik Di Surabaya. *Jurnal Ventura* Vol.5 No.1.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/19 Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa
- The Institute of Internal Auditors. (2016). Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
- Tinuwo, M., Nangoi, G., Pontoh, W. (2017). Pengaruh Kecakapan Profesional, Kompleksitas Tugas, Gaya Kepemimpinan Dan Integritas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Talud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. Vol.8. pp. 182-190.
- Trisnangsih, S. (2007). Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X*. pp. 5-32.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widianto, E. (2015). Pengaruh Pembagian Tugas Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1*.

Yusuf. (2014). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.